

PENGARUH REVOLUSI GLOBAL, TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL DI NTB. SEBUAH TINJAUAN KRITIS AGLOMERASI PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN DI ERA DESENTRALISASI

**Zulkarnain^{*}, Sirwan Yazid Bustami, Mahmuludin,
Kurnia, Sania Cahya Qalbi, Febriyanti¹**

*¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: zulkarnain@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh revolusi industri global terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di NTB, tinjauan kritis aglomerasi pembangunan berbasis kawasan di era desentralisasi dan industrialisasi. Sederhanya tinjauan analisis ini melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masyarakat NTB sangat dipengaruhi oleh tren pembangunan ekonomi global, salah satunya yaitu revolusi industri global Revolusi Industri, dimulai sejak abad ke-18, telah mengalami beberapa tahapan, yaitu Revolusi Industri 1.0 (mesin uap), 2.0 (listrik), 3.0 (komputer dan digitalisasi), dan yang terbaru, 4.0 (IoT, AI, otomatisasi). Revolusi ini telah menimbulkan dampak yang luas pada seluruh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, manufaktur (barang dan jasa), pariwisata, tambang, dan jasa keuangan. Unsur unsur yang disebutkan diatas telah membantu tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB, artinya industrialisasi menjadi kata kunci dari pertumbuhan yang terjadi pada era desentralisasi otonomi daerah, pada tahun sebelum 2008 tingkat pertumbuhan ekonomi NTB sangat rendah, bahkan terbelakang setelah no 2 paling bawah setelah Papua, namun dimulai pada tahun 2008-2013 tingkat pertumbuhan ekonomi NTB no 1 diantara 33 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2014-2017 NTB tetap menjadi NTB terbaik, pada tahun 2018-2024 dinamika pertumbuhan ekonomi terbelakang stagnan, karena semua sektor industri lumpuh total, dan terjadi masa pemulihan saat 2024. selanjutnya pada tahun 2025 pembangunan NTB kedepan apakah tetap berjalan dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya, semuanya akan bergantung pada kebijakan politik NTB, kebijakan politik akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal NTB, adapun pertumbuhan ekonomi NTB selama kurun waktu menjadi NTB paling terbaik di seluruh Indonesia, faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor industrialisasi. Ditengah pertumbuhan yang terjadi, dengan pendekatan observasi kritis, tulisan ini menganalisis perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industrialis, pergeseran pola kerja tradisional ke teknologi, serta berdampak terhadap kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan juga menjadi bagian penting dari teori kritis aglomerasi pembangunan.

Kata kunci: Revolusi industri Global, Desentralisasi, Industrialisasi, Pertumbuhan Ekonomi, NTB, Pembangunan Daerah, Human Capital

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasca orde baru pada tahun 1998, model pembangunan Indonesia mengalami arus perubahan, yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi, model pembangunan sentralistik dianggap sebagai sistem otoritarian, tidak demokratis, jalan satu satunya adalah sistem desentralisasi sebagai tawaran baru dalam pengelolaan pemerintahan yang demokratis, Desentralisasi otonomi daerah dalam pembangunan ekonomi merujuk pada pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam upaya untuk mengelola sumber daya dalam rangka menjalankan program pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,

meningkatkan partisipasi masyarakat, dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada daerah. Selain itu, perubahan sentralisasi ke desentralisasi ini bertujuan, agar pemerataan pembangunan ekonomi lebih pesat terjadi di seluruh wilayah kawasan provinsi, kabupaten, dan kota, karena daerah dianggap sebagai ujung tombak dari pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Desentralisasi sebagai sebuah harapan perubahan alternatif, kini di anggap sebagai jalan satu satunya untuk membawa kebijakan pembangunan yang lebih dekat dengan rakyat, bahkan besar harapan agar pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata di berbagai daerah, namun terkadang seringkali antara konsep dan realita tidak sejalan dengan fakta sesungguhnya. ada ketidak sesuaian dengan ekspektasi.

Model sistem pemerintahan desentralisasi otonomi daerah dalam perjalanannya tidak banyak membawa perubahan, bahkan desentralisasi semakin menimbulkan problematika sosial, arah pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh tren pembangunan ekonomi global, salah satunya yaitu pembangunan modernisme yang mengacu pada industrialisasi manufaktur, sebuah gagasan baru di mulai sejak revolusi industri di inggris telah mempengaruhi negara-negara bagian, terutama asia tenggara, indonesia salah satu negara yang dalam hal ini banyak dipengaruhi oleh arus modernisme pembangunan industri global, dampak yang di timbulkan oleh modernisme industrialisasi global di tingkat lokal government sangat besar, salah satunya yaitu arus globalisasi mulai menyentuh seluruh lapisan sosial yang ada di berbagai daerah, terutama pada sektor budaya, ekonomi, dan perubahan sosial. Pada era desentralisasi politik dan otonomi daerah sebagai ujung tombak dari lajunya pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kebijakan rood mave pembangunan kepala daerah, secara politis, lokal government, kepala daerah memiliki wewenang sangat besar terhadap arah terjadinya perubahan pembangunan, karena tidak lagi bergantung pada pusat, oleh karena itu daerah akan sangat menentukan arah perubahan pembangunan ekonomi sosial, termasuk salah satunya yaitu arah persaingan pembangunan yang mengacu pada sektor industrialisasi manufaktur.

Sektor industrialisasi manufaktur akan membawa multiflayer efek, terutama banyak dampak sosial, pada tingkat lokal di beberapa wilayah kawasan indonesia, pertumbuhan ekonomi di masyarakat sangat bergantung pada corak industrialisasi global, indonesia sebagai negara agraris di beberapa wilayah kawasan wilayah provinsi, kabupaten, kota, tidak lagi mengandalkan modal lokal seperti pertanian, persawahan dan perkebunan sebagai kekuatan pembangunan ekonomi, sebagian besar disulap untuk kepentingan industrialisasi teknologi dan manufaktur, industrialisasi seakan akan dianggap sebagai agama, candu, yang akan banyak membawa banyak perubahan sosial, terutama pada sektor ekonomi dan perubahan sosial. Corak produksi kapitalisme yang berbasis industrialisasi, selain banyak menimbulkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kesejahteraan sosial, disisi yang lain juga telah menimbulkan kesenjangan sosial, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin mencolok, di kawasan perkotaan pertumbuhan ekonomi terbilang berkembang, namun pada tingkat pedesaan justru terjadi sebaliknya, kemiskinan semakin tinggi. Arus perubahan pembangunan yang mangacu pada sektor industrialisasi manufaktur, banyak menyisakan masalah sosial. Secara umum tidak dapat di pungkiri, tingkat pertumbuhan ekonomi indonesia di beberapa wilayah provinsi, kabupaten, kota terbilang reltif berkembang di Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonomi indonesia tergolong maju, tapi disisi lain desentralisasi akan semakin sensitif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera, sebaliknya daerah dengan tingkat pendapatan rendah, serta daerah dengan kesenjangan sosial masih menyisakan problem pembangunan yang tidak merata. Apa yang terjadi pada beberapa kawasan wilayah yang ada di indonesia terutama pada daerah NTB dari tahun ke tahun, telah mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi.

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu kawasan yang saat ini sedang bergegas ke arah perubahan persaingan ekonomi global, Peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan munculnya lapangan kerja baru, tetapi juga tantangan dalam hal kesenjangan ekonomi dan pergeseran pekerjaan semakin meningkat, ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh derasnya pengaruh revolusi industri semakin deras juga. Setiap revolusi industri membawa dampak signifikan pada ekonomi, sosial, dan politik, serta mengubah lanskap pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dalam lanskap desentralisasi otonomi daerah di NTB, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami peningkatan, dari tahun ke tahun, hal ini di tandai dengan mekanisasi produksi menggunakan tenaga mesin dan sistem digitalisasi. Otomatisasi dan penggunaan mesin dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi masyarakat di beberapa tempat terutama di desa. Pergeseran perubahan cara kerja produksi masyarakat dari tenaga

manusia ke tenaga mesin mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menggantungkan harapan hidup pada industri manufaktur, sehingga ledakan urbanisasi masyarakat terjadi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik menyebabkan urbanisasi kian pesat, kemudian seringkali diikuti dengan masalah kemiskinan sosial dan kriminalitas. Derasnya perubahan besar yang di timbulkan oleh revolusi industri global terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah terutama Nusa Tenggara Barat (NTB) pada era desentralisasi ekonomi politik telah membawa arus perubahan besar terhadap produktifitas produksi ekonomi, salah satu pemicu utamanya adalah dampak kemajuan teknologi. Revolusi Industri, dimulai sejak abad ke-18, telah mengalami beberapa tahapan, yaitu Revolusi Industri 1.0 (mesin uap), 2.0 (listrik), 3.0 (komputer dan digitalisasi), dan yang terbaru, 4.0 (IoT, AI, otomatisasi).

Revolusi ini berdampak luas pada ekonomi, sosial, dan tenaga kerja di Indonesia terutama di wilayah provinsi NTB, peluang baru sekaligus tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB berjalan positif, tapi juga banyak menyisakan kemiskinan sosial, kompleksitas kemiskinan sangat deras dipengaruhi oleh industrialisasi global, kemiskinan tercipta oleh karena munculnya industri moderen, yang oleh mazhab merkantilisme dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan itu sendiri, maksudnya ketimpangan sosial terjadi karena adanya industrialisasi itu sendiri. Artinya setelah pembangunan, maka muncul keterbelakangan pembangunan, kemiskinan lahir oleh karena pembangunan itu sendiri, disparitas sosial sangat mencolok, kesenjangan sosial semakin kompleks. Di NTB masih banyak daerah yang mengalami keteringgalan. Faktor-faktor penyebabnya meliputi ketidakmerataan sumber daya alam dan manusia, keterbatasan infrastruktur, serta masalah tata kelola dan akuntabilitas, variabel di atas adalah faktor pembangunan sebagai penyebab kesemuanya. Jika kita mengacu pada tingkat pertumbuhan NTB dari tahun ke tahun berdasarkan angka statistik, dilihat dari periodisasi 2010-2024. secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi NTB berdasarkan peta kawasan di masing masing wilayah kabupaten, kota dominannya di pengaruhi oleh buah hasil dari revolusi industri global yaitu industrialisasi, hanya saja industrialisasi ini kemudian terbagi menjadi beberapa sektor sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, tambang, dan jasa.

Selama periode 2010 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan yang signifikan, tercermin dari pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di seluruh kabupaten dan kota. Berdasarkan perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB), seluruh wilayah di NTB menunjukkan peningkatan nilai ekonomi dari tahun ke tahun, didukung oleh beragam sektor usaha mulai dari pertanian, perdagangan, hingga jasa dan pertambangan. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Lombok Barat mencatatkan kenaikan PDRB ADHB dari Rp7.011,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp12.633,1 miliar pada tahun 2016. Dalam harga konstan (ADHK), peningkatan tercatat dari Rp7.011,3 miliar menjadi Rp9.792,1 miliar pada periode yang sama, menunjukkan pertumbuhan riil sebesar $\pm 39,6\%$ dalam enam tahun. Sektor pertanian tetap menjadi kontributor utama dengan nilai Rp2.618,3 miliar pada 2016 (ADHB), disusul oleh sektor konstruksi (Rp1.597,6 miliar) dan perdagangan besar dan eceran (Rp1.283,3 miliar). Di Kabupaten Lombok Tengah, tren yang sama terjadi dengan lonjakan signifikan pada sektor konstruksi dan pariwisata, terutama pasca pengembangan kawasan Mandalika. Sementara Kabupaten Lombok Timur, yang secara geografis luas dan berbasis agraris, menunjukkan pertumbuhan stabil melalui sektor pertanian, perikanan, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, wilayah Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Sumbawa Barat mengalami lonjakan PDRB akibat kontribusi besar dari sektor pertambangan logam. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi kabupaten ini bersumber dari eksploitasi tambang emas dan tembaga, yang nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah dalam ADHB—menjadikannya salah satu daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di NTB. Kabupaten Sumbawa dan Dompu juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Di Dompu, komoditas jagung menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah sejak 2014, dengan perluasan lahan dan dukungan program pemerintah daerah. Untuk wilayah timur, Kabupaten Bima dan Kota Bima mencatat peningkatan PDRB yang stabil. Kota Bima, sebagai pusat administrasi dan perdagangan, mencatat peran besar sektor jasa dan perdagangan. Pada tahun 2016, nilai PDRB ADHB Kota Bima diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun, sedangkan Kabupaten Bima lebih tinggi karena luas wilayah dan basis pertanian yang lebih dominan. Dari sisi struktur, data tahun 2010–2016 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di sebagian besar wilayah, meskipun proporsinya perlahan menurun

karena tumbuhnya sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan konstruksi. Di Lombok Barat, misalnya, sektor pertanian menyumbang 23,21% dari total PDRB pada tahun 2010 dan menurun menjadi 20,71% pada tahun 2016. Hal ini mencerminkan proses transformasi ekonomi daerah dari agraris menuju struktur ekonomi yang lebih majemuk. Memasuki tahun 2017 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi NTB menghadapi berbagai dinamika, termasuk dampak gempa besar pada 2018 dan pandemi COVID-19 pada 2020. Namun, kebangkitan ekonomi daerah ditunjukkan oleh kinerja positif pada 2022–2024, dengan pemulihan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur besar seperti KEK Mandalika, dan kembali aktifnya kegiatan tambang di Sumbawa Barat.

Tujuan Kegiatan

Tujuan pengabdian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dinamika pembangunan ekonomi daerah pada era desentralisasi pasca-Orde Baru, khususnya dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menelaah pengaruh industrialisasi global, revolusi industri, dan kebijakan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur produksi, serta perubahan sosial yang terjadi di tingkat lokal. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara konsep desentralisasi sebagai instrumen pemerataan pembangunan dengan realitas di lapangan, terutama terkait ketimpangan sosial, pergeseran sektor ekonomi, urbanisasi, dan ketertinggalan pembangunan di beberapa wilayah kabupaten dan kota di NTB.

Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kajian ini adalah memberikan pemahaman akademik dan empiris mengenai dampak desentralisasi dan industrialisasi terhadap pembangunan ekonomi daerah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan kesenjangan sosial, memperkuat basis ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE KEGIATAN

Penelitian ini akan menggunakan kualitatif deskriptif, dimana objek masalah akan mengarah pada rumusan masalah penelitian, dengan berdasarkan pada sejumlah indikator dan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus tentang pengaruh revolusi industri terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB pada periodisasi 2008-2024. Metode studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang kebenaran reliabilitas dan objektifitas suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Cousin, 2005; Yin, 2018). Adapun epistemologi penelitian ini adalah penelitian interpretatif-positivis. Peneliti interpretatif mengambil keberadaan multitafsir dari realitas sebagai diberikan dan hal berarti pembuatan sebagai kunci untuk usaha ilmiah. Tujuannya adalah untuk menafsirkan peristiwa, yakni untuk memahami bagaimana aktor memahami masalah dan mengapa mereka melakukan begitu. Menurut pendekatan ini, pemahaman dan interpretasi berasal dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti (Schwartz-Shea & Yanow, 2012; Walsham, 2006). Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti menggunakan wawancara terstruktur mendalam (in-depth interview).

Interaksi dengan bidang penelitian dilakukan dari bulan maret 2025 hingga september 2025, termasuk proses wawancara mendalam, analisis dokumen, dan focus group discussion (FGD). Pertama, proses wawancara mendalam dilakukan dengan cara memilih responden secara purposive sampling. Kegiatan ini dilakukan dengan segenap stakeholder meliputi beberapa instansi terkait yaitu. Perusahaan-perusahaan teknologi mesin seperti PT. Honda, Suzuki, Toyota, dinas/instansi terkait dinas

perdagangan dan perindustrian Provinsi Nusa Tenggara. Kedua, proses analisis dokumen dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen publik mengenai pembentukan dan inisiasi skema modal asing berupa utang luar negeri. Selain itu juga kami menganalisis dokumen personal yang mungkin dimiliki oleh narasumber yang dapat menjadi bahan analisis yang relevan. Terakhir, ketiga, proses pengumpulan data dengan FGD dengan pihak NGO yang bergerak dalam isu pembangunan, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi dan relevansi dan transparansi penggunaan skema pembiayaan pembangunan melalui utang luar negeri.

Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari subjek sebagai sumbernya; diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara (interview) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini; beberapa diantaranya, pihak pemerintah (pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat) serta pihak BUMN, yakni PT. ITDC selaku operator KEK Mandalika. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian melainkan diperoleh dari studi pustaka (library research) atas sejumlah dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen sekunder ini berupa artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan data-data yang bersumber dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di provinsi NTB dan cakupan kantor pemerintah Provinsi NTB di Mataram. Waktu penelitian ini direncanakan dimulai pada September 2024

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, teknik observasi langsung. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang terjadi. Kedua, teknik wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (face-to-face) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.

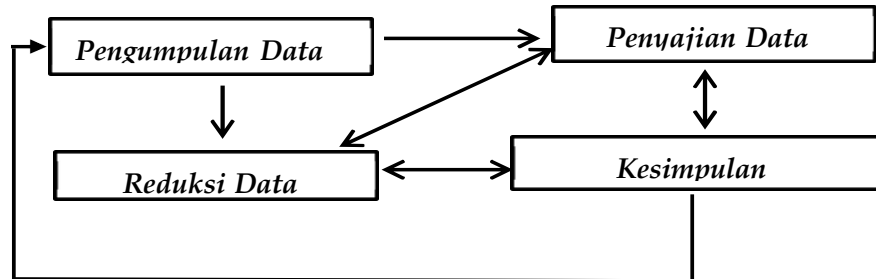
Ketiga, teknik studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada kategorisasi klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku (referensi, pen.), koran, majalah, dan lain-lain. Secara singkat, teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dari berbagai narasumber yang berkaitan dengan bahan penelitian.

Analisis Data

Analisis data diperlukan dalam rangka membuat penelitian memiliki bobot objektivitas yang tepat. Analisis data menggunakan model kongruen, yakni mencari kesesuaian antara teori/konsep dengan data empiris. Pengembangan melalui teknik pengumpulan data dan output data yang diperoleh. Langkah pertama adalah transkripsi hasil wawancara dengan melakukan pengelompokan berdasarkan keyword tertentu. Selanjutnya dilakukan polarisasi terhadap keyword tersebut. Dari hasil generalisasi tersebut kemudian dilakukan proses teorisasi terhadap teori yang tertuang dalam bab sebelumnya.

Menurut Janice McDrury, tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut, yakni pertama, membaca data, menandai kata kunci dan gagasan yang ada dalam data. Kedua, mempelajari kata kunci untuk menemukan tema-tema yang berasal dari data. Ketiga, menuliskan “model” yang ditemukan. Terakhir, keempat, melakukan koding terhadap kata-kata (Moleong, 2015). Data tersebut, oleh peneliti kemudian diolah sesuai dengan fokus persoalan topik penelitian dengan melihat batasan-batasan dan pilihan deskripsi yang bersesuaian terutama pada indikator penelitian serta rumusan masalah. Analisis data pada penelitian ini berupaya menggambarkan masalah sekaligus solusi dari sisi kebijakan dan

proses penguatan dari tujuan penelitian yang dimaksudkan. Berikut adalah model interaktif teknik analisis data yang digambarkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:



Gambar 1. model interaktif teknik analisis data yang digambarkan oleh Miles dan Huberman

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Pengumpulan data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, yakni wawancara, jurnal, laporan, situs resmi, dan sumber internet lainnya. Sedangkan reduksi data dilakukan dengan cara menelaah data yang dikumpulkan untuk dipilih sesuai dengan topik penelitian ini. Selanjutnya dilakukan tahap penyajian data dalam bentuk narasi. Terakhir penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pada turunan masalah secara menyeluruh untuk di jadikan sebagai kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tema yang kami angkat tentang pengaruh revolusi industri global terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di NTB, sebuah tinjauan kritis aglomerasi pembangunan berbasis kawasan di era desentralisasi, tingkat pertumbuhan ekonomi NTB dari tahun ke tahun sangat besar di pengaruhi oleh lajunya revolusi industrialisasi global salah satunya yaitu revolusi yaitu Revolusi Industri 1.0 (mesin uap), 2.0 (listrik), 3.0 (komputer dan digitalisasi), dan yang terbaru, 4.0 (IoT, AI, otomatisasi). Pertumbuhan perusahaan pabrikasi dari teknologi mesin di NTB sangat berkembang pesat, begitupun dengan listrik dan energi, serta pertumbuhan ekonomi pada sektor barang dan jasa, dan sektor industri pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, tambang dan manufaktur juga sangat di pengaruhi oleh teknologi digital, pertumbuhan produk produk ekonomi lokal di NTB banyak di pasarkan melalui teknologi digital. Pada tahun 2013-2017 pada tahun 2008 hingga 2013 sampai pada tahun 2018 NTB bangkit menjadi salah satu provinsi yang memiliki prestasi paling terbaik, bukan hanya di mata indonesia tapi di tingkat global. Periodisasi 2008-2013 hingga 2013-2018 ini menyematkan NTB sebagai provinsi ke-6 dengan angka pengangguran terendah. Meskipun demikian, NTB masih menjadi provinsi termiskin nomor delapan di Indonesia.

NTB pernah menjadi daerah terbaik karena berhasil melakukan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Provinsi pertama dalam pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium (MDGs) Pada tahun 2013, yang kemudian NTB diberikan penghargaan oleh Bappenas sebagai provinsi terbaik pertama dalam Pencapaian Sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Berdasarkan pemetaan pertumbuhan ekonomi di masing masing kabupaten kota di NTB, angka pertumbuhan ekonomi NTB sangat besar di pengaruhi oleh revolusi industri global, tingkat pertumbuhan ini dapat di ukur melalui beberapa tingkat pendapatan di beberapa sektor industri di kabupaten kota, salah satu contoh Kabupaten Lombok Barat mencatatkan kenaikan PDRB ADHB dari Rp7.011,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp12.633,1 miliar pada tahun 2016. Dalam harga konstan (ADHK), peningkatan tercatat dari Rp7.011,3 miliar menjadi Rp9.792,1 miliar pada periode yang sama, menunjukkan pertumbuhan riil sebesar $\pm 39,6\%$ dalam enam tahun. Sektor pertanian tetap menjadi kontributor utama dengan nilai Rp2.618,3 miliar pada 2016 (ADHB), disusul oleh sektor konstruksi (Rp1.597,6 miliar) dan perdagangan besar dan eceran (Rp1.283,3 miliar).

Di Kabupaten Lombok Tengah, tren yang sama terjadi dengan lonjakan signifikan pada sektor konstruksi dan pariwisata, terutama pasca pengembangan kawasan Mandalika. Sementara Kabupaten Lombok Timur, yang secara geografis luas dan berbasis agraris, menunjukkan pertumbuhan stabil melalui sektor pertanian, perikanan, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, wilayah Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Sumbawa Barat mengalami lonjakan PDRB akibat kontribusi besar dari sektor pertambangan logam. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi kabupaten ini bersumber dari eksploitasi tambang emas dan tembaga, yang nilainya bisa mencapai puluhan triliun rupiah dalam ADHB—menjadikannya salah satu daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di NTB. Kabupaten Sumbawa dan Dompu juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Di Dompu, komoditas jagung menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah sejak 2014, dengan perluasan lahan dan dukungan program pemerintah daerah. Untuk wilayah timur, Kabupaten Bima dan Kota Bima mencatat peningkatan PDRB yang stabil. Kota Bima, sebagai pusat administrasi dan perdagangan, mencatat peran besar sektor jasa dan perdagangan. Pada tahun 2016, nilai PDRB ADHB Kota Bima diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun, sedangkan Kabupaten Bima lebih tinggi karena luas wilayah dan basis pertanian yang lebih dominan. Dari sisi struktur, data tahun 2010–2016 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di sebagian besar wilayah, meskipun proporsinya perlahan menurun karena tumbuhnya sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan konstruksi. Di Lombok Barat, misalnya, sektor pertanian menyumbang 23,21% dari total PDRB pada tahun 2010 dan menurun menjadi 20,71% pada tahun 2016.

Hal ini mencerminkan proses transformasi ekonomi daerah dari agraris menuju struktur ekonomi yang lebih majemuk. Memasuki tahun 2017 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi NTB menghadapi berbagai dinamika, termasuk dampak gempa besar pada 2018 dan pandemi COVID-19 pada 2020. Namun, kebangkitan ekonomi daerah ditunjukkan oleh kinerja positif pada 2022–2024, dengan pemulihan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur besar seperti KEK Mandalika, dan kembali aktifnya kegiatan tambang di Sumbawa Barat. Sebagai tinjauan kritis aglomerasi pembangunan di era desentralisasi, di tengah lajunya pertumbuhan ekonomi NTB yang begitu pesat, tingkat kemiskinan di NTB juga tergolong tinggi, artinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTB tidak dengan serta merta diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, jika dibandingkan dengan daerah Jawa pada umumnya, NTB no 8 menjadi daerah termiskin di Indonesia, artinya dari tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonominya bila dibandingkan dengan daerah lainnya tergolong rendah. Pada era desentralisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di NTB, kemiskinan ekstrem masih banyak dialami oleh masyarakat. Sehingga lajunya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTB dapat dikatakan sebagai arus tren global ekonomi yang melahirkan dua cara pandang yaitu pertumbuhan ekonomi NTB tergolong maju dari tahun ke tahun, tapi juga disisi lain masih terjadi kemiskinan dan keterbelakangan oleh sebab karena arus pembangunan tren global itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kritis terhadap pengaruh revolusi industri global terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada era desentralisasi, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi NTB dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh dinamika revolusi industri global, mulai dari Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0 yang ditandai dengan mekanisasi, elektrifikasi, digitalisasi, dan otomatisasi. Transformasi ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, konstruksi, perdagangan, jasa, pertambangan, dan industri manufaktur, yang tercermin dari meningkatnya nilai PDRB di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa model pembangunan berbasis aglomerasi dan industrialisasi di era desentralisasi masih menyisakan persoalan struktural, terutama dalam pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi NTB mencerminkan dua realitas sekaligus, yaitu kemajuan ekonomi yang didorong oleh arus globalisasi dan revolusi industri, serta

keberlanjutan masalah kemiskinan dan ketertinggalan yang menuntut kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan pemikiran selama proses penyusunan kajian ini, baik dari kalangan akademisi, instansi pemerintah, maupun masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustine, Y. & Kristaung, R. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi NTB dalam Angka. Mataram: BPS NTB. Djojohadikusumo, S. 1987. Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dumairy. 1996. Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kusuma, H. 2017. Modul Ekonomi Regional. Malang: UMM Pres.
- Irwan dan Suparmoko. 1988. Ekonomi Public: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ismail, M. 1995. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi: Keputusan Jangka Pendek. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, M. 1995. Desentralisasi fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Sumber : Tempo, Edisi 12-18 Nov 2018 ; Revolusi 4.0 Adalah Kunci”
- Astrid Savitri, Revolusi Industri 4.0, Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0, Genesis, Yogyakarta, 2019.
- Adisasmita, R. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. Yogyakarta: Penerbit BP STIE YKPN.
- Boediono. (1985). Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Christiawan. (2015). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Dumairy. (1996). Perekonomian. Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Fitri, D. N. (2016). Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1984-2013. skripsi..
- Ghozali, I. (2017). Analisis Multivariat Dan Ekonometrika (Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan EvIEWS 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2006). Dasar - Dasar Ekonometrika Edisi 3, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mangkoesobroto. (2001). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mangkoesobroto, G. (2001). Ekonomi Publik, Edisi-III. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw. (2007). Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.
- MS, M. Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. Jurnal Of Economics And Business, Vol. 1 No. 1 September 2017.
- Reynold Simandjuntak, 2012. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, Universitas Negeri Manado.
- Kristian Widya Wicaksono, 2012. Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia, Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
- Gusnar Ismail, 2003. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Tulus Santoso, 2003. Relasi Pusat-Daerah Dalam Menangani Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami. Bawa Ragawino, Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia, FISIP UNPAD.
- Deddy Supriady Bratakusumah, 2000. Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Daerah.

Maulana Rifai, 2017. Otonomi Daerah Dan Globalisasi: Studi Tentang Model Pembangunan Di Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang